

NASKAH PUBLIKASI

**TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI OBYEK
WISATA PUNCAK BECICI DESA MUNTUK, KECAMATAN DLINGO,
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017-2018**

Oleh:

**Merlin Apriliana Puspita Dewi
20150520293**

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025**

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603163038**



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403163025**

TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI OBYEK WISATA PUNCAK BECICI DESA MUNTUK, KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL

Merlin Apriliana Puspita Dewi, Muchamad Zaenuri, Helen Dian Fridayani

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UMY

Email: merlinapd@gmail.com, e_zaenuri@yahoo.co.id,

helendianf9@gmail.com

ABSTRAK

Puncak Becici merupakan Obyek Wisata yang terdapat di Desa Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai daya tarik wisata. Tata kelola pariwisata yang baik harus melibatkan tiga pihak yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Pada tahun 2016 Obyek Wisata Puncak Becici hanya dikelola oleh masyarakat sekitar dengan jumlah kunjungan 222192 wisatawan namun setelah adanya keterlibatan dari pemerintah jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan menjadi 471245. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola Obyek Wisata sangat penting bagi pengembangan Obyek Wisata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk lebih menekankan pada penggambaran bagaimana proses masalah itu muncul berdasarkan data yang ada di lapangan. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumen dan wawancara.

Penelitian ini mengacu pada teori Pitana bahwa aktor-aktor yang terlibat dan bekerjasama dalam system kepariwisataan mengacu pada tiga pilar governance yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dan teori Hadiwijoyo bahwa pariwisata berbasis masyarakat dapat berhasil apabila ada sumberdaya, organisasi-organisasi masyarakat, manajemen dan pembelajaran. Pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dan Dinas Pariwisata DIY, peran pemerintah dalam hal ini memberikan pelatihan peningkatan SDM dan menyediakan kawasan hutan sedangkan masyarakat yaitu Koperasi Noto Wono dan Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici melakukan pengembangan dalam pengelolaan Obyek Wisata seperti menjaga eksistensi hutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kolaborasi antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, Dinas Pariwisata DIY, Koperasi Noto Wono dan Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici. Kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dan Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici sangat baik pada pengelolaan Sumber Daya Alam dimana kelestarian di Obyek Wisata Puncak Becici sangat dijaga oleh pengelola yang didampingi RPH Mangunan. Sedangkan Keterlibatan Dinas Pariwisata DIY yaitu memberikan fasilitas dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Akan tetapi di Obyek Wisata Puncak Becici belum melibatkan Pemerintah Desa dan juga pihak Swasta.

Kata Kunci: Tata Kelola, Pariwisata, Pariwisata Berbasis Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki potensi di industry pariwisata dimana terdapat berbagai sumber daya alam termasuk hutan. Yogyakarta memiliki kawasan hutan dengan luas $\pm 16.358,60$ Ha. Kawasan hutan dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Dengan adanya hutan lindung, kawasan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi potensi wisata. Seperti yang terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) DIY nomor 7 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pengelolaan hutan lindung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi dan sosial.

Pariwisata yang memanfaatkan hutan pinus sebagai daya tarik pengunjung, salah satunya adalah Puncak Becici yang terletak di Dusun Gunung Cilik, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Dahulu lokasi ini merupakan kawasan hutan produksi penghasil getah pinus, sehingga banyak masyarakat yang menyadap getah pohon tersebut, namun apabila kegiatan itu terus dilakukan akan merusak pohon. Kemudian beberapa warga sekitar sadar akan potensi wisata yang dimiliki oleh Puncak Becici sehingga mereka mulai mengelola hutan tersebut menjadi obyek wisata. Puncak Becici merupakan hutan lindung dibawah pengelolaan RPH Mangunan. Pemerintah memberikan izin kepada masyarakat sekitar untuk mengelola hutan. Pada tahun 2016 Obyek Wisata Puncak Becici hanya dikelola oleh masyarakat sekitar dengan jumlah kunjungan 222192 wisatawan namun setelah adanya keterlibatan dari pemerintah jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan menjadi 471245. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola Obyek Wisata sangat penting bagi pengembangan Obyek Wisata.

Hal ini memberi dampak yang positif bagi penduduk sekitar karena dapat mengurangi pengangguran dan memberi peluang kepada warga lainnya untuk berdagang/berjualan di lokasi tersebut. Karena pedagang yang menyediakan aneka makanan, minuman dan lain-lain, adalah warga asli dusun Munthuk. Hal tersebut berdampak besar pada perekonomian warga sekitar dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat yakni secara sosial, budaya dan ekonomis. Namun apabila pengembangan tersebut tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat. Tata kelola pariwisata yang baik melibatkan tiga pihak yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Masyarakat local sebagai actor dalam mengembangkan pariwisata, pihak swasta menyediakan pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata, sedangkan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan daerah serta menetapkan kebijakan guna mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai tata kelola pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat yaitu mengelola pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat jadi masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan tersebut, sehingga manfaat dari kepariwisataan tersebut diperuntukan bagi masyarakat.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tata Kelola

Menurut Koiman (2009:273), governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Rochman (2009:276) Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif.

2. Pariwisata

Menurut Oka A. Yoety, Pariwisata adalah suatu pengalaman mengunjungi atau mendatangi suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian serta kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial dan budaya alam. Dari pemaparan tersebut ditarik kesimpulan bahwa pariwisata adalah kegiatan atau perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ke suatu tempat yang keluar dari tempat tinggal biasanya dengan tujuan untuk kesenangan ataupun keperluan lainnya.

Menurut Yoeti dalam (Jejen, 2018:13) bentuk pariwisata di kelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Tujuan yaitu pariwisata budaya, pariwisata rekreasi, pariwisata sosial, pariwisata olahraga, pariwisata politik, pariwisata kesehatan dan pariwisata keagamaan.
- b. Berdasarkan Letak Geografi, yaitu pariwisata regional, pariwisata local, nasional tourism, regional international tourism, international tourism.
- c. Berdasarkan pengaruh terhadap neraca pembayaran yaitu pariwisata aktif adalah kegiatan pariwisata dengan masuknya wisatawan asing ke dalam suatu Negara tertentu sehingga mendatangkan devisa. Sedangkan pariwisata pasif adalah keluarnya penduduk ke suatu Negara lain untuk melakukan kegiatan kunjungan sehingga mengurangi cadangan devisa.
- d. Menurut alasannya yaitu seasional tourism adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, occational tourism (kegiatan pariwisata yang dilakukan menurut kejadian atau event-event tertentu).

3. Tata Kelola Pariwisata

Menurut Muntasib dalam (Widiyanti, 2016), tata kelola pariwisata adalah bagian dari governance baik dari tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tata kelola pariwisata yaitu pengelolaan pariwisata secara kolaboratif yang melibatkan beberapa sector, diantaranya sector pemerintah dan non pemerintah. Maka tata kelola dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan dalam tata kelola pariwisata alam yang dikelola masyarakat terdapat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda-beda.
- b. Pengelolaan pariwisata alam ditentukan bersama.
- c. Tidak ada pelaku dominan yang menentukan gerak aktor lain walaupun terdapat banyak aktor yang terlibat.
- d. Adanya relasi dari pelaku dan sector pariwisata atas budaya dan sumberdaya alam untuk wisata.

- e. Perlu mempersiapkan perencanaan yang mengikuti jaman sekaligus dapat membuat inovasi baru sebagai sesuatu yang menjadi ciri khas Indonesia.

Penerapan *governance* dalam pariwisata di Indonesia telah dikemukakan oleh Pitana dalam (Zaenuri, 2018:31) membahas aktor-aktor yang terlibat dan bekerjasama dalam system kepariwisataan. Konsep mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam system kepariwisataan mengacu pada tiga pilar *governance* yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

4. Pariwisata Berbasis Masyarakat

Baskoro, BRA (2008) mengatakan bahwa *Community Based Tourism (CBT)* adalah suatu konsep yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat/komunitas agar lebih mampu memahami nilai-nilai dan aset yang dimiliki, seperti adat istiadat, gaya hidup, kebudayaan, dan masakan kuliner. Komunitas tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk pengalaman berwisata. Menurut (Zubaedi, 2014) pemberdayaan masyarakat yaitu suatu cara agar mampu meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga dengan adanya pemberdayaan tersebut masyarakat yang kurang mampu dapat berkembang dan melepaskan diri dari kondisi kemiskinan. Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, dengan cara memotivasi, mendorong, dan, mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata. Berdasarkan penjabaran diatas, memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berbeda dengan pariwisata pada umumnya. Didalam pariwisata berbasis masyarakat, komunitas adalah aktor utama sebagai pengelola pariwisata dan bertujuan untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat.

Menurut Hadiwijoyo dalam (Novia, 2014:478) agar pelaksanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat dapat berhasil dengan baik, terdapat elemen-elemen yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Sumberdaya alam dan budaya
 - 1) Sumber daya alam terjaga dengan baik
 - 2) Ekonomi local dan modal produksi tergantung keberlanjutan pengguna sumberdaya
 - 3) Kebudayaan yang unik sebagai tujuan
- b. Organisasi-organisasi masyarakat
 - 1) Masyarakat berbagai kesadaran, norma dan ideology
 - 2) Masyarakat memiliki tokoh yang dituakan yang mengerti akan tradisi local dan pengetahuan serta kebijakan setempat
 - 3) Masyarakat memiliki rasa saling memiliki dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh mereka sendiri
- c. Manajemen
 - 1) Masyarakat memiliki aturan dan peraturan untuk lingkungan, budaya dan manajemen pariwisata
 - 2) Organisasi local atau mekanisme yang ada untuk mengelola pariwisata dengan kemampuan untuk menghubungkan pariwisata dan pengembangan masyarakat
 - 3) Keuntungan didistribusikan secara adil bagi masyarakat
 - 4) Keuntungan dari pariwisata memberikan kontribusi terhadap dana masyarakat untuk pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat
- d. Pembelajaran (learning)

- 1) Membina proses belajar bersama antara tuan rumah dan tamu
- 2) Mendidik dan membangun pemahaman tentang budaya dan cara hidup yang beragam
- 3) Meningkatkan kesadaran konservasi alam dan budaya di kalangan wisatawan dan masyarakat setempat

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berarti bahwa prosedur dari penelitian ini menggunakan data deskriptif berupa kalimat tertulis yang dikumpulkan melalui wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang sumber datanya berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Koperasi Noto Wono, Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici dan masyarakat Dusun Gunung Cilik.

D. Hasil dan Pembahasan

Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat

1. Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Alam Terjaga dengan Baik

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melibatkan peran pemerintah karena pemerintah sebagai regulator. Tanpa adanya regulasi yang jelas, seluruh kegiatan pariwisata yang dilakukan masyarakat dianggap sebagai tindakan yang melanggar karena, kegiatan pariwisata tersebut tergolong illegal. Maka untuk menghindari tindakan tersebut dibentuk regulasi oleh pemerintah setempat. Sehingga, dalam melakukan kegiatan pariwisata lebih terarah dan terstruktur yang dapat berpengaruh terhadap pemerintah dan masyarakat. Adapun peran dari pemerintah tersebut sebagai berikut:

1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta

Puncak Becici merupakan kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Pemerintah melalui Dinas Kehutanan DIY. Dinas kehutan DIY memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola seluruh Kawasan hutan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kehutan berperan sebagai regulator sehingga merumuskan suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang menyebutkan bahwa pengelolaan hutan lindung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY juga memiliki Unit Analisa Pelaksana Teknis Daerah yaitu Kepala Balai yang ditugaskan untuk mengelola hutan dan memiliki Resort Pengelola Hutan yang ditugaskan untuk mendampingi, mengawasi dan mengarahkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk mengelola pariwisata tersebut. Karena merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang berlangsung di Obyek Wisata Puncak Becici. Sehingga tanpa ada keterlibatan dari pemerintah tentu hal ini akan sangat membahayakan karena, masyarakat akan sewenang-wenang dalam memanfaatkan potensi yang ada. Bahkan yang paling mengawatirkan adalah bisa saja menyebabkan kerusakan alam yang diakibatkan dari aktivitas

manusia. Oleh sebab itu disinilah kehadiran dari pemerintah yang dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan perusakan kawasan obyek wisata puncak becici.

2) Balai Kesatuan Pengelola Hutan Yogyakarta

Dinas kehutanan dan Perkebunan mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditugaskan untuk mengelola hutan yang dikenal dengan Kepala Balai. Selanjutnya, perkembangan pengelolaan hutan secara nasional harus dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan. Kesatuan Pengelolaan Hutan di provinsi DIY dimulai tahun 2009 dengan nama Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY tidak sebagai pelaksana pengelola hutan tetapi sebagai pengendali.

Pengaruh dengan adanya KPH tersebut yaitu masyarakat menjadi lebih tertib dalam memanfaatkan hutan dengan tidak merusak pepohonan, tidak ada penebangan liar, serta masyarakat dapat memanfaatkan kayu-kayu yang berjatuh untuk dijadikan bahan untuk membuat spot foto. Tentu dengan adanya KPH masyarakat lebih patuh dan tata kelola lebih tertata dengan baik.

3) Resort Pengelola Hutan Mangunan

Pada dasarnya RPH dan KPH memiliki peran yang sama akan tetapi, kekuasaannya lebih tinggi KPH jadi kebijakan lebih kuat apabila dari KPH, sedangkan RPH tidak bisa memberikan kebijakan hanya dapat mengajukan. KPH pun tidak berani mengambil kebijakan atau memberi izin karena yang berwenang memberi izin adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Karena Slogan yang dimiliki yaitu “masyarakat sejahtera hutan lestari”, RPH Mangunan mengarahkan agar melestarikan hutan dengan melakukan pemupukan, penanaman kembali, pembuatan terasiring, dibuatkan tempat-tempat aliran air supaya terarah dan tidak merusak. RPH Mangunan hanya mengawasi wilayahnya saja agar tidak rusak dan mengawasi pembangunan atau infrastruktur jangan sampai lebih dari 10% yang dikelola. Setiap tanggal sepuluh Resort Pengelola Hutan dan pengelola mengadakan pertemuan untuk membahas.

Dengan adanya RPH Mangunan kegiatan atau aktivitas dikawasan tersebut menjadi lebih terkendali karena diawasi oleh RPH Mangunan. Sehingga apabila terjadi penyimpangan akan segera ditegur dan dibina agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan alam. Kerjasama antara RPH Mangunan dengan Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici sudah baik karena Pengelola mematuhi dan memenuhi apa yang disampaikan oleh RPH Mangunan.

Sumber daya alam yang ada di Obyek Wisata Puncak Becici sudah terjaga dengan baik karena baik pengelola, masyarakat sekitar dan pemerintah turut berpartisipasi dalam melestarikan hutan. Bukan hanya itu, pengunjung yang ada di Obyek Wisata Puncak Becici juga sudah sadar akan lingkungan sehingga ketika berkunjung tidak merusak hutan.

- b. Ekonomi Lokal dan Modal Produksi Tergantung Keberlanjutan Pengguna Sumberdaya

Ekonomi local dan modal produksi warga sekitar tidak tergantung kepada keberlanjutan sumberdaya. Artinya usaha-usaha yang mereka buat dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti kerajinan-kerajinan bamboo sudah ada sebelum Obyek Wisata Puncak Becici dibuka. Akan tetapi sekarang kerajinan tersebut semakin ramai pembeli yang diakibatkan dari adanya Obyek Wisata Puncak Becici.

- c. Kebudayaan yang Unik Sebagai Tujuan

Seperti yang telah disampaikan diatas, wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata Puncak Becici adalah untuk menikmati pemandangan yang disajikan, selain itu suasana yang sejuk dan rindang membuat wisatawan yang berdatangan merasa nyaman karena udaranya yang masih asri.

2. Organisasi-organisasi Masyarakat

Di Obyek Wisata Puncak Becici terdapat organisasi-organisasi masyarakat yang bersinergi yaitu Koperasi Noto Wono, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Karang Taruna dan Kelompok Sadar Wisata.

- a. Masyarakat memiliki Norma dan Ideologi

Pengelolaan Obyek Wisata Puncak Becici tentu tidak terlepas dari organisasi-organisasi masyarakat seperti Koperasi Noto Wono, Pengelola, Karang Taruna, Kelompok Sadar Wisata dan lain-lain. Walaupun setiap organisasi tersebut memiliki norma atau ideology yang berbeda, tapi mereka memiliki satu tujuan yang sama yaitu meningkatkan sector pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian hutan di kawasan Obyek Wisata Puncak Becici.

- b. Masyarakat Memiliki Tokoh yang Dituakan

Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici memiliki tokoh yang dituakan yaitu Bapak Sugandi Saputro. Beliau adalah ketua dari Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici. Beliau dipilih menjadi ketua karena mengerti akan tradisi local dan pengetahuan mengenai dunia pariwisata khususnya pariwisata yang memanfaatkan hutan, selain itu juga memiliki kebijakan untuk menentukan keputusan terkait pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan di Obyek Wisata Puncak Becici.

- 1) Masyarakat Berpartisipasi dalam Pembangunan yang Dilakukan Oleh Mereka Sendiri

Terdapat dua tim pengelola di dalam Obyek Wisata Puncak Becici, yaitu:

- a) Koperasi Noto Wono

Kawasan hutan yang terdapat di Dlingo merupakan kawasan milik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Koperasi Noto Wono dibentuk untuk mewadahi aktivitas Kelompok Tani Hutan atau aktivitas masyarakat yang dilakukan di hutan berkaitan dengan pariwisata. Partisipasi Koperasi Noto Wono adalah sebagai payung hukum yang memiliki alat pungut yang disebut dengan operator. Koperasi ini memiliki tujuh operator dan dua sub unit operator sehingga terdapat Sembilan kelompok masyarakat diantaranya Pinus Pengger,

Puncak Becici, Pinus Sari, Seribu Batu Rumah Hobbit, Bukit Panguk, Bukit Mojo, Lintang Sewu (terdapat dua sub unit yaitu Pinus Asri dan Lembah). Seluruh operator tersebut dibawah kendali Koperasi Noto Wono sehingga operator bertanggung jawab kepada Koperasi dan Koperasi bertanggungjawab kepada Pemerintah.

Setiap satu bulan sekali pada tanggal 10 mengadakan pertemuan rutin yang di hadiri oleh Operator dan Instansi Pemerintahan (RPH) yang membahas mengenai himbuan atau penyampaian program kerja, hingga evaluasi. Koperasi Noto Wono memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh operator. Karena operator merupakan tanggungjawab dari Koperasi.

b) Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici

Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici merupakan operator di kawasan tersebut. Anggota yang tergabung dalam pengelola merupakan warga asli Gunung Cilik karena memang letak dari Obyek Wisata Puncak Becici adalah di desa tersebut sehingga masyarakat asli diberdayakan agar merasakan manfaat dari adanya kegiatan pariwisata. Peran dari Pengelola Inti sangat berdampak pada keberlanjutan Obyek Wisata Puncak Becici karena mereka yang terjun langsung untuk mengelola wisata ini mulai dari perencanaan hingga evaluasi..

Seperti yang telah disampaikan diatas, peran dari kedua kelompok masyarakat tersebut berdampak pada pengembangan dan keberlanjutan di Obyek Wisata Puncak Becici. Kedua kelompok tersebut saling terikat satu sama lain akan tetapi memiliki tugas yang berbeda dimana Koperasi Noto Wono adalah wadah dari para operator pengelola Obyek Wisata Puncak Becici. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan di Obyek Wisata Puncak Becici harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Koperasi Noto Wono karena koperasi ini merupakan pemegang kendali dari para pengelola.

1) Jeep Wisata (Dlingo Advanture Community)

Adanya Obyek Wisata Puncak Becici memberi peluang kepada masyarakat untuk mendirikan usaha agar menunjang pengembangan dari Obyek Wisata tersebut salah satunya adalah Jeep Wisata. Masyarakat yang ingin memulai usaha ini akan tergabung dalam Komunitas Jeep Wisata yang bernama Dlingo Adventure Community. komunitas ini memiliki konsep pemberdayaan yang artinya anggota yang tergabung dalam komunitas ini hanya warga asli Desa Muntuk. Jumlah armada yang dimiliki yaitu 21 buah dan masing-masing Jeep memiliki dua driver untuk mengoperasikan. Dlingo Adventure Community juga memiliki kegiatan sosial kemasyarakatan diantaranya membersihkan rute jalan, penambalan jalan berlubang, dan santunan anak yatim yang terdapat di Dusun Muntuk. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas tersebut memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.

2) Homestay

Fasilitas yang terdapat di Obyek Wisata Puncak Becici salah satunya adalah homestay. Awal mula terbentuknya yaitu masyarakat sekitar memikirkan inovasi baru agar dapat berkembang dengan memanfaatkan

adanya Obyek Wisata Puncak Becici, yang pada akhirnya memutuskan untuk membuat home stay. Bapak Saryanto mengajak warga untuk turut berpartisipasi. Di Dusun Gunung Cilik terdapat sepuluh homestay rata-rata memiliki tiga kamar, warga sekitar membentuk kepengurusan yang diketuai oleh Bapak Saryanto. Setelah membentuk kepengurusan mereka juga membuat peraturan yang harus ditaati oleh pengunjung salah satunya yaitu tidak boleh menerima tamu yang berpasangan akan tetapi tidak dengan status menikah. Apabila ada yang melanggar, akan ditegur karena sudah disepakati bersama, hal tersebut dilakukan untuk menjaga nama baik Desa.

Peran dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebagai fasilitator yaitu memberikan closet pada setiap homestay. Selain itu karena Obyek Wisata Puncak Becici secara administrative terletak di Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga membantu mempromosikan wisata tersebut.

3) Warung Makan

Warung makan ini dibuat setelah adanya Obyek Wisata Puncak Becici dan terletak di dalam area Obyek Wisata. Di dalam areanya sendiri terdapat beberapa warung dan setiap warung ada yang memiliki dua pegawai atau tiga pegawai. Pemilik dan pegawai tersebut merupakan penduduk asli Dusun Gunung Cilik. Setiap harinya pendapatan selalu berbeda dan selalu melonjak di hari liburan. Warung-warung yang terdapat di Obyek Wisata Puncak Becici merupakan tempat yang sudah disediakan oleh pengelola. Sehingga siapapun warga Dusun Gunung Cilik atau Desa Muntuk diperbolehkan untuk menempatnya dengan biaya sewa warung setiap bulannya sekitar Rp 260.000,- akan tetapi belum dengan biaya listrik perbulan Rp 50.000,-.

4) Cinderamata

Di Obyek Wisata Puncak Becici tidak hanya terdapat warung makan saja, akan tetapi juga terdapat warung pernak-pernik dengan berbagai macam pilihan seperti gantungan kunci, wayang kulit, gelang, dan lain-lain. Keberadaan warung pernak-pernik merupakan opsi bagi wisatawan untuk membeli oleh-oleh atau buah tangan khas dari Puncak Becici. Ada yang menarik dari pernak-pernik yang terdapat disini bahwasanya tidak semua barang yang tersedia diambil dari luar akan tetapi juga ada sebagian yang dibuat oleh pemilik usaha sendiri.

Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat memang memiliki peran yang sangat penting kaitannya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti yang telah dijelaskan diatas. Hal ini karena pemerintah tidak mungkin akan mampu menyediakan fasilitas yang lengkap atau bekerja sendiri. Oleh karena itu kelompok masyarakat sekitar Objek Wisata Pucak Becici sangat membantu dan mengurangi beban dari pemerintah. Akan tetapi meskipun begitu peran pemerintah juga tetap ada dalam membantu atau memfasilitasi masyarakat hal ini seperti dengan memberikan bantuan kepada pemilik homestay sebesar 15 juta rupiah untuk membuat kamar mandi yang lebih baik dan nyaman. Oleh sebab itu peran masyarakat dan pemerintah

sangatlah penting dan dibutuhkan untuk lebih memajukan pariwisata yang ada khususnya pusat pariwisata puncak becici.

3. Manajemen

a. Masyarakat Memiliki Aturan dan Peraturan untuk Lingkungan, Budaya dan Manajemen Pariwisata

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat, begitu juga masyarakat yang memiliki aturan untuk lingkungan sekitar. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk merusak tanaman, menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Masyarakat dihimbau untuk menjaga alam dengan cara merawat hutan seperti memberi pupuk pada tanaman, menanam pepohonan, melakukan gotong royong untuk membersihkan tanaman-tanaman liar, dan tetap menjaga keindahan alam. Manajemen pengelolaan pariwisata yang diterapkan sesuai dengan *standard operating procedure*. Apabila ada karyawan / bagian dari pengelola melakukan kesalahan dalam pekerjaan tentu akan diberi sanksi yang berlaku sesuai dengan tingkat kesalahan yang dibuat. Hal tersebut dilakukan agar Pengelola dapat disiplin dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung.

b. Organisasi Local atau Mekanisme yang ada untuk Mengelola Pariwisata dengan Kemampuan untuk Menghubungkan Pariwisata dan Pengembangan Masyarakat

Organisasi memiliki peranan penting kaitannya dengan bagaimana mengelola obyek wisata puncak becici. Organisasi ini yang nantinya akan membantu masyarakat yang ada disana untuk lebih meningkatkan kualitas dan juga pengembangan masyarakat sekitar. Organisasi yang ada dalam pengelolaan pariwisata puncak becici diantaranya yaitu pengelola Obyek Wisata Puncak Becici dan Koperasi Noto Wono. Lebih lanjut lagi koperasi Notowono ini secara umum menjadi badan hukum yang menjamin keberlangsungan dari setiap obyek wisata yang ada. Didalam koperasi Notowono terdiri dari para pengelola obyek wisata di 9 titik yang di dalamnya ada obyek wisata punya becici. Pengelola obyek wisata puncak becici ini selanjutnya akan bertanggung kepada koperasi Notowono.

Seperti yang telah dijelaskan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa organisasi local dalam hal ini Koperasi Noto Wono dan Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici telah berupaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat. Dan masyarakat mulai menyesuaikan kemampuan tersebut dengan baik.

c. Keuntungan Didistribusikan Secara Adil Bagi Masyarakat

Mekanisme keuangan atau pembagian hasil pendapatan telah dipahami oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga memang sudah ada keterbukaan atau transparansi dari masing-masing pihak. Tiket masuk yang terdapat di Obyek Wisata Puncak Becici diberikan dari Dinas Keuangan. Setiap tiket masuk dikumpulkan menjadi satu kemudian dihitung bersama. Pembagian hasil pendapatan sebesar 70% untuk pengelola, 5% untuk koperasi dan 25% langsung diberikan kepada Kas Daerah atau Pemerintah Daerah yang diawasi oleh Inspektorat dan dipastikan secara langsung.

Pendapatan bersih yang diterima oleh pengelola pada tahun 2017 yaitu Rp 1.063.380.000 dan PAD yang diterima yaitu Rp 354.460.000. Pada pertengahan tahun 2017 pendapatan yang diterima oleh pengelola dibagi kepada Koperasi Noto Wono sebesar 5%. Sedangkan pendapatan bersih yang diterima oleh Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici pada tahun 2018 yaitu Rp 1.374.286.200, PAD yang diterima Pemerintah yaitu Rp 490.816.500 dan Koperasi Noto Wono mendapatkan pemasukan sebesar Rp 98.163.300. Hasil pendapatan Obyek Wisata Puncak Becici mengalami peningkatan dimana pada tahun sebelumnya mendapatkan hasil Rp 1.063.380.000.

Dalam mengelola pariwisata tentu pihak-pihak yang tergabung sebagai pengelola akan diberi gaji atau upah. Mereka mendapatkan gaji atau upah sesuai dengan Upah Minimum Regional yang berlaku di daerah tersebut. Akan tetapi kegiatan pariwisata tidak setiap hari ramai atau pengunjung yang berdatangan setiap harinya tidak dengan jumlah yang sama.

- d. Keuntungan dari Pariwisata Memberikan Kontribusi terhadap Dana Masyarakat untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici juga peduli terhadap kegiatan sosial, keuntungan dari hasil kegiatan pariwisata tidak hanya dibagikan kepada pegawai saja akan tetapi juga kepada masyarakat sekitar. Hasil yang didapat dibagi menjadi tiga yaitu 40% untuk kesejahteraan karyawan, 25% untuk kegiatan pembangunan, dan 35% untuk sosial.

4. Pembelajaran atau *Learning*

- a. Membina Proses Belajar Bersama antara Tuan Rumah dan Tamu

Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici dalam menjalankan tugasnya dibekali dengan pembelajaran manajemen pengelolaan pariwisata, pendampingan dan pelatihan. Pendampingan dan pelatihan dilakukan untuk memberi ilmu kepada pengelola mengenai bagaimana tugas yang telah diberikan kepada masing-masing individu agar mereka memahami apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan bidang yang diterima, selain itu juga agar dapat berbagi ilmu kepada wisatawan yang datang mengenai bagaimana tata kelola yang terdapat di Obyek Wisata Puncak Becici.

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berperan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan hanya sebagai pembina teknis. Dimana pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta terjun langsung mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, segmen pasar mana yang akan dituju, dan juga dengan memberi pemahaman mengenai ecotourism atau yang dikenal sebagai wisata berbasis lingkungan. Karena yang dijual adalah potensi hutan maka harus dipikirkan untuk kedepannya supaya dapat berkelanjutan akan tetapi tidak merusak fungsi hutan. Potensi warga harus dioptimalkan yang utama adalah masyarakat yang mengembangkan karena sebagai pelaku dan penikmat hasil pariwisata.

Selain memberikan fasilitas Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan pelatihan kepada masyarakat. Selain Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga membantu mempromosikan pariwisata. Pariwisata tidak akan berhasil apabila hanya dikelola oleh Dinas Pariwisata saja, dari segi tenaga, sumber daya

manusia dan dana sangat terbatas. Adanya sinergitas dengan stakeholder yang lain yaitu dengan warga masyarakat, swasta, dan media untuk memajukan pariwisata.

b. Mendidik dan Membangun Pemahaman Tentang Budaya dan Cara Hidup yang Beragam

Pemberlajaran yang dilakukan yaitu untuk meningkatkan kapasitas seperti pembelajaran bahasa. Karena pengunjung yang berdatangan tidak hanya dari domestic akan tetapi juga dari mancanegara. Sehingga bekal mengenai budaya yang dimiliki dan cara memperlakukan wisatawan asing juga harus dipelajari oleh Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici. Tapi biasanya setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda sehingga hasil yang didapat dari kegiatan pembelajaran tersebut tidak sama setiap individu.

c. Meningkatkan Kesadaran Konservasi Alam dan Budaya di Kalangan Wisatawan dan Masyarakat Setempat

Alam dan budaya merupakan dua hal yang harus tetap dijaga kelestariannya dengan kata lain harus ada konservasi. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Di Obyek Wisata Puncak Becici sudah menerapkan hal tersebut karena seluruh Obyek Wisata yang tergabung dalam Koperasi Noto Wono memiliki peraturan dan keharusan untuk menjaga alam dan budaya. Seperti yang tertuang dalam visi dari koperasi jasa wisata Noto Wono adalah merawat, menjaga, dan melestarikan hutan untuk dikembangkan jasa lingkungan wisata alam dalam rangka mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam hal menjaga sumber daya alam dan budaya adalah sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan oleh pengelola yang tergabung dalam Koperasi Noto Wono termasuk Obyek Wisata Puncak Becici. Di Obyek Wisata Puncak Becici sudah menerapkan hal tersebut karena walaupun sudah banyak didirikan fasilitas seperti spot foto, camping ground, flying fox dan lain-lain akan tetapi pembangunan tersebut tetap memperhatikan sumber daya alam tanpa merusaknya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat di Obyek Wisata Puncak Becici dapat disimpulkan bahwa terdapat kolaborasi antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, Dinas Pariwisata DIY, Koperasi Noto Wono dan Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici. Kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dan Pengelola Obyek Wisata Puncak Becici sangat baik pada pengelolaan Sumber Daya Alam dimana kelestarian di Obyek Wisata Puncak Becici sangat dijaga oleh pengelola yang didampingi RPH Mangunan. Sedangkan Keterlibatan Dinas Pariwisata DIY yaitu memberikan fasilitas dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Akan tetapi di Obyek Wisata Puncak Becici belum melibatkan Pemerintah Desa dan juga pihak Swasta.

Daftar Pustaka

- Baskoro, BRA & Rukendi, C. (2008). Membangun Kota Pariwisata Berbasis Komunitas; Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal Kepariwisata Indonesia Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia*, vol 3, no 1. hlm 5-7.
- Purbasari, Novia dan Asnawi. (2014). Keberhasilan Community Based Tourism Wisata Kembangarum, Pentingsari dan Nglanggeran. *Jurnal Teknik PWK*, vol 3, no 3. hlm 478.
- Sendarmayanti, 2012. *Good Governance "Pemerintahan yang Baik"* Bagian Kedua, Edisi Revisi, Bandung: Mandar maju.
- Syahputra, Hendra. (2017). *Pengelolaan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat di Hutan Pinus Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Tajudin, Jejen. (2018). *Strategi Pengembangan Desa Wisata di Mangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PADES) Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Widiyanti, Handini. (2016). *Strategi Tata Kelola Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur*. Tesis, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Yoeti, Oka, A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradaya Pratama.
- Zaenuri, Muhammad. (2018). *Tata Kelola Pariwisata Bencana Berbasis Collaborative Governance*. Yogyakarta: Explore.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.